1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

No	Komoditas	April		Perubahan	Mei		Perubahan	Juni		Perubahan
		M2	M4		M2	M4		M2	M4	
1	Beras Medium*	Rp 13.000	Rp 13.000	0,00%	Rp 13.500	Rp 13.500	0,00%	Rp 13.500	Rp 13.500	0,00%
2	Beras Premium*	Rp 14.900	Rp 14.800	-0,67%	Rp 14.900	Rp 14.900	0,00%	Rp 14.900	Rp 14.900	0,00%
3	Cabe Merah*	Rp 40.000	Rp 50.000	25,00%	Rp 55.000	Rp 80.000	45,45%	Rp 45.000	Rp 35.000	-22,22%
4	Bawang Merah*	Rp 40.000	Rp 38.000	-5,00%	Rp 40.000	Rp 45.000	12,50%	Rp 55.000	Rp 45.000	-18,18%
5	Daging Ayam Broiler*	Rp 31.000	Rp 30.000	-3,23%	Rp 32.000	Rp 30.000	-6,25%	Rp 28.000	Rp 23.000	-17,86%
6	Telur Ayam Ras*	Rp 28.000	Rp 28.000	0,00%	Rp 27.000	Rp 27.000	0,00%	Rp 26.000	Rp 24.000	-7,69%
7	Daging Sapi*	Rp 135.000	Rp 135.000	0,00%	Rp 135.000	Rp 140.000	3,70%	Rp 140.000	Rp 140.000	0,00%
8	Gula Pasir Lokal*	Rp 18.500	Rp 18.500	0,00%	Rp 18.000	Rp 17.500	-2,78%	Rp 17.500	Rp 17.500	0,00%
9	Bawang Putih*	Rp 35.000	Rp 35.000	0,00%	Rp 35.000	Rp 35.000	0,00%	Rp 40.000	Rp 40.000	0,00%
10	Cabe Rawit Merah*	Rp 60.000	Rp 55.000	-8,33%	Rp 70.000	Rp 80.000	14,29%	Rp 65.000	Rp 40.000	-38,46%
11	Minyak Goreng (Kemasan)	Rp 22.000	Rp 24.000	9,09%	Rp 24.000	Rp 24.000	0,00%	Rp 24.000	Rp 24.000	0,00%
12	Minyak Goreng (Curah)	Rp 24.000	Rp 22.000	-8,33%	Rp 22.000	Rp 22.000	0,00%	Rp 20.000	Rp 22.000	10,00%
13	Mie Instan*	Rp 3.000	Rp 3.000	0,00%	Rp 3.000	Rp 3.000	0,00%	Rp 3.000	Rp 3.000	0,00%
14	Susu Bubuk*	Rp 55.700	Rp 55.700	0,00%	Rp 55.700	Rp 55.700	0,00%	Rp 55.500	Rp 55.500	0,00%
15	Ikan Kembung*	Rp 60.000	Rp 60.000	0,00%	Rp 60.000	Rp 60.000	0,00%	Rp 60.000	Rp 60.000	0,00%
16	Tempe 1 Kg*	Rp 12.000	Rp 12.000	0,00%	Rp 12.000	Rp 12.000	0,00%	Rp 12.000	Rp 12.000	0,00%
17	Tepung Terigu Segitiga Biru*	Rp 10.000	Rp 10.000	0,00%	Rp 10.000	Rp 10.000	0,00%	Rp 10.000	Rp 10.000	0,00%
18	Udang*	Rp 120.000	Rp 120.000	0,00%	Rp 120.000	Rp 120.000	0,00%	Rp 120.000	Rp 120.000	0,00%
19	Tahu Mentah 1 Kg*	Rp 11.000	Rp 11.000	0,00%	Rp 11.000	Rp 11.000	0,00%	Rp 11.000	Rp 11.000	0,00%
20	Pisang 1 Kg*	Rp 7.000	Rp 7.000	0,00%	Rp 6.000	Rp 7.000	16,67%	Rp 6.000	Rp 6.000	0,00%
21	Susu Balita (SGM) 400Gr*	Rp 44.500	Rp 44.500	0,00%	Rp 44.500	Rp 44.500	0,00%	Rp 44.500	Rp 44.500	0,00%
22	Jeruk 1 Kg*	Rp 30.000	Rp 30.000	0,00%	Rp 30.000	Rp 25.000	-16,67%	Rp 22.000	Rp 20.000	-9,09%

Berdasarkan survei harga kebutuhan pokok di Pasar Banjar dan rekapitulasi data Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SiLinda Jabar), perkembangan harga pangan selama April–Juni 2026 menunjukkan pergerakan yang berbeda antarbulan. Pada April, mayoritas harga relatif stabil atau turun, meskipun cabai merah dan minyak goreng kemasan mengalami kenaikan. Pada Mei, tekanan harga terutama terlihat pada kelompok hortikultura menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha. Memasuki Juni, sejumlah harga komoditas bergejolak menurun, sementara sebagian komoditas lain tetap stabil atau masih relatif tinggi.

Kenaikan dalam bulan April terpantau pada cabai merah dari Rp. 40.000 menjadi Rp. 50.000/kg (25,00%) dan minyak goreng kemasan dari Rp. 22.000 menjadi Rp. 24.000 (9,09%).

Pada periode yang sama, bawang merah, cabai rawit merah, daging ayam broiler, serta minyak goreng curah mengalami penurunan. Adapun beras medium, telur ayam ras, daging sapi, gula pasir, bawang putih dan sebagian besar produk pangan olahan relatif stabil.

Pada Mei, lonjakan harga paling tinggi terlihat pada cabai merah dari Rp. 55.000 menjadi Rp. 80.000/kg (45,45%), cabai rawit merah dari Rp. 70.000 menjadi Rp. 80.000/kg (14,29%), dan bawang merah dari Rp. 40.000 menjadi Rp. 45.000/kg (12,50%). Daging sapi meningkat dari Rp. 135.000 menjadi Rp. 140.000/kg (3,70%), sementara harga daging ayam broiler, gula pasir, dan jeruk melemah. Laporan perkembangan harga Mei mengaitkan kenaikan hortikultura dan daging sapi dengan meningkatnya permintaan menjelang Iduladha serta penyesuaian harga di daerah pemasok.

Pada Juni, koreksi harga cukup kuat terjadi pada cabai rawit merah dari Rp. 65.000 menjadi Rp. 40.000/kg (−38,46%); cabai merah dari Rp. 45.000 menjadi Rp. 35.000/kg (−22,22%); bawang merah dari Rp. 55.000 menjadi Rp. 45.000/kg (−18,18%); daging ayam broiler dari Rp. 28.000 menjadi Rp. 23.000/kg (−17,86%); dan telur ayam ras dari Rp. 26.000 menjadi Rp. 24.000/kg (−7,69%). Minyak goreng curah justru naik dari Rp. 20.000 menjadi Rp. 22.000 (10,00%), sedangkan sebagian besar komoditas pangan olahan relatif tidak berubah.

Secara kumulatif, dari April M2 sampai Juni M4, penurunan terbesar terjadi pada cabai rawit merah (−33,33%), jeruk (−33,33%), daging ayam broiler (−25,81%), telur ayam ras (−14,29%), pisang (−14,29%), dan cabai merah (−12,50%). Sebaliknya, komoditas yang meningkat mencakup bawang putih (14,29%), bawang merah (12,50%), minyak goreng kemasan (9,09%), beras medium (3,85%), dan daging sapi (3,70%). Persentase kumulatif tersebut dihitung dari titik awal dan akhir triwulan, sehingga tidak menggambarkan kenaikan/penurunan tertinggi yang sempat terjadi di tengah periode.

Fluktuasi harga terutama berkaitan dengan variasi permintaan pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional, kondisi pasokan dari sentra produksi, serta penyesuaian harga di tingkat petani dan distributor sebagaimana dijelaskan dalam laporan bulanan April–Juni. Walaupun tren sejumlah komoditas menurun pada akhir Juni, risiko gejolak kembali tetap perlu diwaspadai, terutama cabai, bawang dan protein hewani

a. IPH Kota Banjar Triwulan II 2026

Secara keseluruhan, pergerakan IPH Kota Banjar selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga pangan bersifat dinamis. Penurunan IPH pada April mencerminkan meredanya tekanan harga pasca-Idulfitri, sementara perubahan ke zona positif pada Mei menunjukkan meningkatnya tekanan harga menjelang Iduladha. Memasuki Juni, IPH kembali mengalami penurunan yang mengindikasikan berkurangnya tekanan harga seiring perubahan permintaan dan kondisi pasokan pangan.

Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Banjar perlu terus diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat koordinasi dan pemantauan harga secara berkelanjutan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada komoditas pangan bergejolak agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi secara lebih dini.

1) April 2026

Pada bulan April 2026, IPH Kota Banjar menunjukkan tren penurunan secara konsisten

sepanjang lima minggu pemantauan. Pada minggu pertama, IPH tercatat sebesar -0,96, kemudian menurun menjadi -1,47 pada minggu kedua, -2,07 pada minggu ketiga, -2,41 pada minggu keempat, hingga mencapai -2,62 pada minggu kelima. Kondisi ini mengindikasikan kecenderungan penurunan harga pada sejumlah komoditas pangan yang dipantau.

Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya harga beberapa komoditas strategis, terutama cabai rawit merah, daging ayam broiler, dan telur ayam ras. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan pasokan serta menurunnya permintaan masyarakat setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Secara umum, perkembangan IPH April menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga pangan relatif mereda, meskipun pengawasan terhadap komoditas yang mengalami fluktuasi tetap diperlukan..

2) Mei 2026

Memasuki bulan Mei 2026, IPH Kota Banjar mengalami perubahan arah yang cukup signifikan dari zona negatif menjadi positif. Pada minggu pertama, IPH tercatat sebesar 0,70, kemudian sedikit menurun menjadi 0,54 pada minggu kedua, dan kembali meningkat menjadi 0,61 pada minggu ketiga. Perkembangan ini menunjukkan munculnya kembali tekanan kenaikan harga pangan, meskipun pergerakannya relatif terbatas selama periode pemantauan.

Kondisi tersebut sejalan dengan kenaikan harga beberapa komoditas strategis, terutama cabai merah, cabai rawit merah, bawang merah, dan daging sapi. Peningkatan harga dipengaruhi antara lain oleh bertambahnya permintaan masyarakat menjelang HBKN Idul adha serta kenaikan harga dari daerah pemasok. Meskipun demikian, sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan atau relatif stabil sehingga turut meredam tekanan harga secara keseluruhan. Oleh karena itu, perkembangan IPH pada Mei menunjukkan perlunya penguatan pemantauan pasokan dan distribusi, khususnya terhadap komoditas pangan bergejolak (*volatile* food)..

3) Juni 2026

Pada bulan Juni 2026, IPH Kota Banjar kembali menunjukkan tren penurunan setelah berada pada zona positif pada bulan sebelumnya. Pada minggu pertama, IPH tercatat sebesar 0,28, kemudian turun menjadi -0,39 pada minggu kedua, -0,88 pada minggu ketiga, dan mencapai -1,70 pada minggu keempat. Penurunan secara berkelanjutan ini menunjukkan semakin meredanya tekanan kenaikan harga pangan hingga akhir Triwulan II.

Perkembangan tersebut sejalan dengan penurunan harga sejumlah komoditas strategis, terutama cabai merah, cabai rawit merah, daging ayam broiler, telur ayam ras, dan jeruk. Penurunan harga dipengaruhi oleh membaiknya ketersediaan pasokan, turunnya harga di tingkat petani maupun distributor, serta berkurangnya permintaan terhadap komoditas tertentu. Pada daging ayam broiler, penurunan permintaan juga berkaitan dengan berkurangnya penyerapan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Meskipun IPH menunjukkan kecenderungan negatif, kenaikan harga komoditas tertentu, khususnya bawang putih, tetap perlu diwaspadai.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Volatilitas komoditas hortikultura masih tinggi. Cabai merah, cabai rawit merah, dan bawang merah meningkat pada Mei, kemudian terkoreksi pada Juni. Harga yang berubah tajam antarwaktu meningkatkan ketidakpastian bagi konsumen, pedagang, dan produsen serta menyulitkan pengaturan waktu intervensi pasar.

- Ketergantungan terhadap sentra pasokan dari luar daerah masih menjadi faktor kerentanan. Seperti pasokan cabai merah dan cabai rawit merah dari Garut serta Wonosobo, bawang merah dari Garut, Sumenep, Brebes dan Majalengka, serta bawang putih dari Solo, Cirebon dan Surabaya. Perubahan produksi, biaya distribusi, atau harga di daerah pemasok berpotensi diteruskan ke Pasar Banjar.
- Permintaan musiman pada HBKN menimbulkan tekanan harga yang terpusat pada komoditas tertentu. Pada Mei, peningkatan permintaan menjelang Idula Adha yang berkaitan dengan kenaikan cabai dan daging sapi. Penyesuaian pasokan dan pelaksanaan intervensi perlu dilakukan sebelum periode puncak permintaan.
- Ketidakstabilan harga protein hewani juga memerlukan perhatian dari sisi keseimbangan pasar. Turunnya harga daging ayam broiler dan telur ayam ras pada Juni dikaitkan dengan pasokan yang meningkat dan penurunan harga di tingkat peternak. Berkurangnya serapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah sebagai salah satu faktor pada daging ayam broiler.
- Bawang putih dan minyak goreng kemasan tetap perlu dipantau secara khusus. Dari April M2 ke Juni M4, bawang putih naik 14,29% dan minyak goreng kemasan naik 9,09%. Pada Juni, naiknya harga bawang putih dikaitkan dengan kenaikan harga pemasok dan penurunan pasokan, sehingga memerlukan deteksi dini atas risiko kelangkaan dan peningkatan biaya distribusi.
- Upaya intervensi pasar seperti Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran
- Respons terhadap gejolak harga pangan terkadang terhambat oleh kurangnya sinkronisasi program dan perbedaan pendekatan solusi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

- Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) pada tanggal 21 Mei 2026 sebagai salah satu langkah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan alternatif akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi instrumen intervensi pemerintah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha. Pelaksanaan OPM juga diarahkan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi potensi tekanan harga pada komoditas pangan yang mengalami peningkatan permintaan.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan kegiatan Selasa Pasar Hasil Tani (SAPAHATI) pada tanggal 22 Mei 2026. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan akses pangan masyarakat melalui penyediaan dan pemasaran komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaan GPM bertujuan mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pada komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan menjelang HBKN. Sementara itu, kegiatan SAPAHATI diarahkan untuk mempertemukan produsen atau petani dengan konsumen sehingga dapat memperpendek rantai pemasaran, memperluas akses pasar bagi hasil pertanian lokal, dan mendukung pembentukan harga yang lebih efisien. Kegiatan ini sekaligus
-

menjadi sarana untuk memperkuat peran petani lokal dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat Kota Banjar.

- Pemerintah Kota Banjar melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar sebanyak 6 kali selama Triwulan II Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:
    1. April 2026 : tanggal 7 dan 23 April.
    2. Mei 2026 : tanggal 6 dan 25 Mei.
    3. Juni 2026 : tanggal 4 dan 25 Juni.
- Kegiatan sidak pasar dilaksanakan sebagai langkah pengawasan langsung terhadap perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di tingkat pedagang. Melalui kegiatan sidak pasar ini, Pemerintah Kota Banjar melakukan pemantauan terhadap komoditas strategis yang berpotensi mengalami gejolak harga, khususnya beras, cabai, bawang, daging ayam, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Selain untuk memperoleh gambaran kondisi pasar secara aktual, sidak pasar juga menjadi sarana identifikasi dini terhadap potensi kelangkaan pasokan, kenaikan harga yang tidak wajar, serta hambatan distribusi yang dapat memengaruhi keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
- Pada April dan Juni 2026, kegiatan OPM, GPM, dan kegiatan sejenis tidak dilaksanakan karena berdasarkan hasil pemantauan, kondisi harga kebutuhan pokok di Kota Banjar secara umum dinilai relatif terjaga dan terkendali. Sementara itu, pelaksanaan intervensi harga dipusatkan pada Mei 2026, ketika sejumlah komoditas pangan strategis mengalami tekanan kenaikan harga menjelang HBKN Idul Adha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga dengan perkembangan harga dan kebutuhan intervensi di daerah. Meskipun kegiatan pasar murah tidak dilaksanakan setiap bulan, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan tetap dilakukan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelaksanaan intervensi selanjutnya.

2. Ketersediaan Pasokan

- Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) à Pemerintah Kota Banjar terus melaksanakan Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) selama Triwulan II Tahun 2026 sebagai salah satu upaya mendukung ketersediaan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat. Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penanaman komoditas pangan, khususnya cabai rawit dan komoditas hortikultura lainnya yang berpotensi menjadi penyumbang tekanan inflasi. Pelaksanaannya melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) maupun masyarakat umum dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lahan pekarangan yang tersedia. Melalui kegiatan PAKAYA, Pemerintah Kota Banjar berupaya mendorong peningkatan produksi pangan skala rumah tangga, memperkuat kemandirian pangan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan komoditas tertentu dari luar daerah dalam jangka menengah dan panjang.
- Pelaksanaan Penanaman Jagung Serentak Bersama Forkopimda Pada tanggal 7 April 2026. Pemerintah Kota Banjar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya peningkatan produksi komoditas jagung yang memiliki peran penting dalam rantai pasok pangan dan pakan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berupaya mendukung pemanfaatan lahan pertanian secara produktif serta memperkuat kapasitas produksi pangan lokal sebagai

salah satu fondasi dalam menjaga ketahanan pasokan daerah.

- Pemberian Bantuan Benih Ikan Air Tawar kepada Kelompok Pembudidaya Ikan. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan sumber protein hewani, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan penyaluran bantuan benih ikan air tawar kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) selama Triwulan II Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:
    1. April 2026: penyaluran bantuan benih ikan air tawar pada tanggal 1 dan 27 April kepada 5 Pokdakan.
    2. Mei 2026: penyaluran bantuan benih ikan air tawar pada tanggal 22 dan 26 Mei kepada 4 Pokdakan.
    3. Juni 2026: pemberian bantuan benih ikan nila dan gurame pada tanggal 23 Juni kepada 3 Pokdakan.
- Secara keseluruhan penyaluran bantuan benih ikan kepada 12 kelompok penerima dalam kegiatan selama Triwulan II Tahun 2026. Program tersebut bertujuan mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya, meningkatkan kapasitas produksi ikan air tawar, serta memperkuat ketersediaan pangan sumber protein hewani yang berasal dari produksi lokal. Dalam jangka menengah, penguatan sektor perikanan budidaya diharapkan dapat membantu meningkatkan ketersediaan pasokan ikan konsumsi, mendukung ketahanan pangan masyarakat, dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasokan komoditas perikanan dari luar daerah.
- Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) à Pada tanggal 9 April 2026, Pemerintah Kota Banjar melalui Distan Kota Banjar melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Wereng Batang Coklat di kawasan persawahan Bojongkantong. Kegiatan ini merupakan langkah perlindungan tanaman pangan melalui upaya pengendalian serangan organisme pengganggu yang berpotensi menurunkan produktivitas dan hasil panen padi. Pengendalian OPT diarahkan untuk mengurangi risiko kerusakan tanaman, menjaga potensi produksi gabah, serta mendukung keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mempertahankan kapasitas produksi pangan lokal, khususnya komoditas beras yang merupakan salah satu kebutuhan pokok utama masyarakat.

3. Kelancaran Distribusi

- Pemerintah Kota Banjar melaksanakan pemantauan ketersediaan bahan pangan di tingkat distributor selama periode April sampai dengan Juni 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi dan kesinambungan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Pemantauan tersebut diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi ketersediaan komoditas pangan, mengidentifikasi potensi hambatan pasokan, serta mendukung deteksi dini terhadap risiko kelangkaan barang yang dapat menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen. Kegiatan ini memiliki peran penting mengingat sebagian kebutuhan pangan Kota Banjar masih dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain, antara lain cabai dari Garut dan Wonosobo, bawang merah dari Garut, Sumenep, Brebes, dan Majalengka, serta sejumlah komoditas pangan lainnya dari berbagai wilayah pemasok. Dengan adanya pemantauan di tingkat distributor, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pasokan sebagai bahan koordinasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi pangan.
- Penguatan Informasi Rantai Pasok dan Kondisi Ketersediaan Pangan à Melalui kegiatan pemantauan harga di Pasar Banjar dan pengumpulan informasi ketersediaan pangan di

tingkat distributor, Pemerintah Kota Banjar melakukan pengamatan terhadap hubungan antara perkembangan harga pasar dan kondisi pasokan komoditas strategis. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan identifikasi komoditas yang mengalami fluktuasi harga akibat perubahan pasokan maupun permintaan. Perhatian terutama diarahkan pada komoditas hortikultura dan protein hewani yang memiliki tingkat volatilitas relatif tinggi.

4. Komunikasi Efektif

- ***High Level Meeting*** Pemerintah Kota Banjar dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar perihal pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan sebanyak 6 kali pada triwulan II 2026 (6 dan 22 April 2026, 11 dan 25 Mei 2026, 8 dan 26 Juni 2026). Kegiatan HLM dilaksanakan sebagai forum koordinasi strategis dalam merumuskan arah kebijakan pengendalian inflasi daerah berdasarkan perkembangan kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di Kota Banjar. Forum ini berperan sebagai sarana penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menentukan langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga, menjaga kesinambungan pasokan pangan, serta mendukung keselarasan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi. Pelaksanaan HLM secara berkala juga mendukung proses evaluasi kondisi perkembangan harga, penyampaian informasi dari perangkat daerah terkait, dan perumusan langkah pengendalian yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
- Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah à Pemerintah Kota Banjar secara berkelanjutan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional dan Rakor Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan pertukaran informasi mengenai perkembangan harga komoditas pangan, kondisi ketersediaan pasokan, permasalahan distribusi, serta berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilaksanakan di masing-masing daerah. Partisipasi dalam rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mendukung penyelarasan langkah pengendalian inflasi berdasarkan
- Pelaporan Perkembangan Harga Pangan Secara Harian melalui Sistem Informasi Digital meliputi:
    1. Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SiLinda) Jawa Barat.
    2. Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Simawas Pagi).
    3. Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Pelaksanaan pelaporan tersebut bertujuan menyediakan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok secara berkala, sekaligus mendukung pemantauan terhadap perubahan harga komoditas pangan strategis yang berpotensi memengaruhi kondisi inflasi daerah. Data yang dihimpun melalui sistem informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perkembangan harga, identifikasi komoditas yang mengalami kenaikan atau penurunan signifikan, serta dasar pertimbangan dalam menentukan kebutuhan intervensi pengendalian inflasi.
- Publikasi data harga bahan kebutuhan pokok di media sosial dan Papan *running text* yang ada di depan alun-alun Kota Banjar à Dalam rangka meningkatkan transparansi informasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinas KUKMP) melaksanakan publikasi informasi harga pangan secara harian melalui media sosial dan papan informasi harga yang tersedia di

kawasan Alun-Alun Kota Banjar
    - Penguatan Koordinasi dan Pemantauan Perkembangan Harga sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan à Selama Triwulan II Tahun 2026, koordinasi pengendalian inflasi daerah didukung oleh pelaksanaan HLM, rapat koordinasi tingkat provinsi, pemantauan langsung kondisi pasar, pemantauan ketersediaan pasokan di tingkat distributor, serta pelaporan dan publikasi harga pangan secara harian. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi instrumen penting dalam penyediaan informasi bagi Pemerintah Kota Banjar untuk mengidentifikasi perkembangan harga komoditas strategis dan mempertimbangkan langkah pengendalian inflasi sesuai kondisi pasar. Melalui penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan ketepatan respons kebijakan, memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi gejolak harga, serta menjaga kesinambungan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah.
    - Pengawasan peredaran barang dan jasa di Kota Banjar.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Keterjangkauan Harga (K1)

1. Pelaksanaan kebijakan keterjangkauan harga melalui Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Selasa Pasar Hasil Tani (SAPAHATI) pada Mei 2026 merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha. Kegiatan tersebut menyediakan alternatif akses pangan dengan harga yang lebih terjangkau serta mendukung upaya menjaga daya beli masyarakat.
2. Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar sebanyak 6 kali selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya pengawasan langsung terhadap kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok. Kegiatan tersebut mendukung identifikasi dini terhadap potensi kenaikan harga, gangguan pasokan, serta perkembangan kondisi pasar yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
3. Berdasarkan perkembangan harga, sejumlah komoditas strategis mengalami kenaikan cukup signifikan pada Mei, terutama cabai merah, cabai rawit merah, dan bawang merah. Namun, pada Juni harga berbagai komoditas tersebut kembali mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya tekanan harga pada akhir triwulan. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pasar murah karena juga dipengaruhi oleh peningkatan pasokan, perubahan permintaan, dan penyesuaian harga di tingkat pemasok.
4. Pelaksanaan OPM, GPM, dan SAPAHATI yang terkonsentrasi pada Mei menunjukkan bahwa intervensi harga telah mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Namun, frekuensi pelaksanaan yang terbatas berpotensi mengurangi jangkauan manfaat bagi masyarakat, khususnya apabila terjadi lonjakan harga secara mendadak di luar periode pelaksanaan kegiatan.
5. Ke depan, pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga perlu diperkuat melalui perencanaan yang lebih preventif dan berbasis data perkembangan harga harian. Penentuan waktu, lokasi, jenis komoditas, serta volume barang yang disediakan perlu disesuaikan dengan tingkat kerawanan harga dan kebutuhan masyarakat agar intervensi dapat berlangsung lebih tepat sasaran.

b. Ketersediaan Pasokan (K2) à

1. Pelaksanaan Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) selama Triwulan II Tahun 2026 merupakan upaya penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman komoditas pangan, terutama cabai rawit dan komoditas hortikultura lainnya. Program ini memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan produksi pangan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
2. Pelaksanaan penanaman jagung serentak bersama Forkopimda pada 7 April 2026 menunjukkan adanya dukungan lintas sektor terhadap peningkatan produksi pertanian. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas produksi pangan lokal, meskipun manfaatnya terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga baru dapat diukur setelah diperoleh data perkembangan luas tanam, produktivitas, serta hasil panen.
3. Pemberian bantuan benih ikan air tawar kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) selama April, Mei, dan Juni merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas produksi pangan sumber protein hewani. Berdasarkan laporan bulanan, bantuan tercatat diberikan kepada 5 Pokdakan pada April, 4 Pokdakan pada Mei, dan 3 Pokdakan pada Juni. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya, memperkuat pasokan ikan konsumsi, serta mendukung ketahanan pangan daerah dalam jangka menengah.
4. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Wereng Batang Coklat pada 9 April 2026 di wilayah Bojongkantong merupakan langkah antisipatif dalam menjaga produktivitas tanaman padi. Kegiatan tersebut penting untuk mengurangi risiko kehilangan hasil pertanian akibat serangan hama sehingga dapat mendukung keberlanjutan produksi gabah dan ketersediaan beras di tingkat daerah.
5. Meskipun berbagai program peningkatan produksi pangan telah dilaksanakan, hasilnya terhadap stabilisasi harga belum dapat diukur secara menyeluruh karena sebagian besar kegiatan bersifat penguatan produksi jangka menengah dan panjang. Diperlukan pemantauan lebih lanjut terhadap hasil produksi, produktivitas, keberhasilan budidaya, dan kontribusi pasokan lokal terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat.
6. Selain itu, ketergantungan Kota Banjar terhadap pasokan komoditas tertentu dari luar daerah, khususnya cabai, bawang, serta beberapa komoditas protein hewani, masih menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan pasokan. Oleh karena itu, penguatan produksi pangan lokal perlu diimbangi dengan kerja sama antardaerah dan koordinasi bersama pemasok untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga

c. Kelancaran Distribusi (K3)

1. Pelaksanaan pemantauan ketersediaan bahan pangan di tingkat distributor selama Triwulan II Tahun 2026 merupakan langkah penting dalam mendukung kelancaran distribusi dan memastikan kesinambungan pasokan komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan tersebut membantu pemerintah daerah memperoleh informasi mengenai kondisi stok serta potensi hambatan pasokan yang dapat memengaruhi perkembangan harga di tingkat konsumen.
2. Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga, fluktuasi sejumlah komoditas pangan strategis masih dipengaruhi oleh perubahan harga dan kondisi pasokan dari daerah pemasok. Hal tersebut terutama terlihat pada komoditas cabai merah, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putih yang memiliki ketergantungan terhadap rantai distribusi antardaerah.

Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit merah pada Juni menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasokan dan penurunan harga di tingkat pemasok. Namun, kenaikan harga bawang putih pada periode yang sama memperlihatkan bahwa risiko tekanan harga akibat perubahan pasokan dan harga distributor masih perlu diwaspadai.

4. Pelaksanaan kebijakan kelancaran distribusi pada Triwulan II masih didominasi oleh kegiatan pemantauan ketersediaan pangan di tingkat distributor. Berdasarkan dokumen pelaksanaan kegiatan yang tersedia, belum terdapat informasi yang memadai mengenai realisasi kerja sama distribusi antardaerah, pengurangan biaya logistik, maupun penyelesaian perbaikan infrastruktur distribusi yang sebelumnya direncanakan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan dalam menurunkan hambatan distribusi belum dapat dinilai secara menyeluruh.
5. Ke depan, pemantauan distribusi perlu dikembangkan menjadi sistem pengawasan rantai pasok yang lebih terintegrasi, termasuk pemetaan daerah pemasok, identifikasi jalur distribusi utama, pemantauan stok distributor, dan antisipasi gangguan pengiriman. Penguatan kerja sama antardaerah juga diperlukan untuk menjamin kesinambungan pasokan, terutama pada komoditas pangan strategis yang rentan mengalami fluktuasi harga

d. Komunikasi Efektif (K4)

1. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Banjar sebanyak 3 kali selama Triwulan II Tahun 2026, yaitu pada 22 April, 11 Mei, dan 26 Juni 2026, menunjukkan keberlanjutan koordinasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Forum tersebut menjadi sarana penyampaian perkembangan kondisi harga, identifikasi permasalahan, serta pembahasan langkah pengendalian yang diperlukan sesuai dinamika pasar.
2. Keikutsertaan Pemerintah Kota Banjar dalam Rapat Koordinasi Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mendukung penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan pasokan, dan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh daerah lain.
3. Pelaporan perkembangan harga pangan secara harian melalui SiLinda Jabar, Simawas Pagi, dan SP2KP menunjukkan adanya dukungan sistem informasi dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. Ketersediaan data harga secara berkala memungkinkan pemerintah daerah memantau komoditas yang mengalami perubahan harga serta mengidentifikasi potensi tekanan harga sejak dini.
4. Publikasi informasi harga pangan melalui media sosial Dinas KUKMP dan papan informasi harga di kawasan Alun-Alun Kota Banjar merupakan upaya meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi harga secara rutin dapat memberikan referensi bagi masyarakat dalam melakukan pembelian kebutuhan pokok sekaligus mendukung keterbukaan informasi pasar.
5. Meskipun kegiatan koordinasi dan pelaporan telah dilaksanakan secara berkelanjutan, pemanfaatan data harga sebagai dasar pengambilan keputusan masih perlu diperkuat. Pelaporan harga sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga dimanfaatkan dalam penyusunan analisis tren harga, identifikasi komoditas berisiko, serta penentuan langkah intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran.
6. Efektivitas komunikasi antarpemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan melalui penguatan mekanisme tindak lanjut hasil HLM dan rapat koordinasi. Setiap hasil pembahasan perlu didukung dengan rencana aksi yang jelas, penetapan perangkat daerah penanggung jawab, serta pemantauan realisasi kegiatan agar koordinasi tidak
3.

hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga mendorong pelaksanaan kebijakan yang terukur

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Meningkatkan frekuensi dan efektivitas pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Selasa Pasar Hasil Tani (SAPAHATI), terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan periode meningkatnya permintaan masyarakat.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi stabilisasi harga berbasis data perkembangan harga harian agar penentuan waktu, lokasi, sasaran, dan jenis komoditas lebih tepat serta mampu mengantisipasi potensi kenaikan harga sejak dini.
3. Memprioritaskan pemantauan dan pengendalian harga komoditas pangan bergejolak (volatile food), khususnya cabai merah, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging ayam broiler, dan telur ayam ras yang menunjukkan fluktuasi harga selama Triwulan II Tahun 2026.
4. Memperkuat keberlanjutan program SAPAHATI sebagai sarana pemasaran hasil pertanian lokal untuk memperpendek rantai distribusi, meningkatkan pendapatan petani, dan menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
5. Meningkatkan intensitas inspeksi mendadak (sidak) pasar dan pengawasan harga kebutuhan pokok sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga, kelangkaan pasokan, serta gangguan distribusi.
6. Memperluas dan memperkuat Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) melalui peningkatan keterlibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat dalam pengembangan komoditas pangan strategis, terutama cabai dan tanaman hortikultura.
7. Mengoptimalkan program peningkatan produksi pertanian, termasuk penanaman jagung dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), guna menjaga produktivitas pertanian dan mengurangi risiko gangguan produksi pangan daerah.
8. Meningkatkan efektivitas program bantuan benih ikan air tawar kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) melalui pendampingan teknis, pemantauan hasil budidaya, serta evaluasi kontribusinya terhadap ketersediaan pangan sumber protein hewani.
9. Memperkuat pemetaan kebutuhan dan ketersediaan pangan daerah melalui pendataan produksi, stok, konsumsi, dan asal pasokan komoditas strategis sebagai dasar perencanaan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih akurat.
10. Meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog dan pemangku kepentingan terkait dalam menjaga kesinambungan pasokan beras serta mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan.
11. Memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi pangan, khususnya daerah pemasok cabai, bawang, dan komoditas strategis lainnya, guna menjamin kesinambungan pasokan dan mengurangi risiko fluktuasi harga akibat ketergantungan terhadap daerah lain.
12. Mengoptimalkan pemantauan ketersediaan bahan pangan di tingkat distributor melalui pengawasan stok, perkembangan harga pemasok, dan kelancaran pengiriman barang untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan distribusi.
13. Melakukan pemetaan rantai pasok dan jalur distribusi komoditas pangan strategis untuk mengidentifikasi hambatan logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mengurangi potensi kenaikan harga akibat tingginya biaya pengiriman.
14. Mendorong percepatan tindak lanjut perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan

yang menghubungkan sentra produksi, distributor, dan pasar guna mendukung kelancaran distribusi serta menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

15. Memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, pedagang, dan distributor untuk memastikan kelancaran arus barang, mengantisipasi potensi kelangkaan, serta menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis di pasar.
16. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID melalui penyusunan rencana aksi yang terukur, penetapan penanggung jawab, serta evaluasi berkala terhadap tindak lanjut hasil koordinasi pengendalian inflasi daerah.
17. Mengoptimalkan pemanfaatan data dari SiLinda Jabar, Simawas Pagi, dan SP2KP sebagai dasar analisis perkembangan harga, identifikasi komoditas berisiko, serta pengambilan keputusan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data
18. Mengembangkan sistem pemantauan dan peringatan dini (early warning system) pengendalian inflasi daerah yang mengintegrasikan informasi perkembangan harga, ketersediaan stok, kebutuhan pangan, dan kondisi distribusi untuk mengantisipasi potensi gejolak harga secara preventif.
19. Meningkatkan kualitas komunikasi dan publikasi informasi harga pangan melalui media sosial, papan informasi harga, serta kanal komunikasi publik lainnya agar masyarakat memperoleh informasi harga kebutuhan pokok secara mudah, transparan, dan berkelanjutan.
20. Memperkuat edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi bijak, pemanfaatan pangan lokal, dan diversifikasi konsumsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu serta mendukung ketahanan pangan rumah tangga.
21. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi secara berkala dengan mengintegrasikan hasil pemantauan IPH, perkembangan harga komoditas strategis, realisasi kegiatan pengendalian inflasi, serta kondisi pasokan dan distribusi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pada triwulan berikutnya